



KONFERENSI ASIA AFRIKA, FORUM EKONOMI DUNIA DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

Poltak Partogi Nainggolan*)

Abstrak

Indonesia baru saja menjadi tuan rumah dua kegiatan internasional sekaligus, yang sangat bernilai historis dan juga penting bagi kinerja pemerintahan baru, baik di dalam negeri maupun di fora internasional. Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tahun dan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economy Forum on East Asia/WEF) merupakan ujian besar bagi kemampuan kinerja internasional rejim baru Indonesia dan kepemimpinannya setelah kunjungan perkenalannya ke negara ASEAN, Jepang, dan Tiongkok. Kepemimpinan Presiden Jokowi tidak lagi bisa bersandar pada pencitraan domestik dan dukungan media, namun dituntut lebih dari itu, yakni dukungan asing melalui realisasi kerja sama yang lebih nyata di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Kepemimpinannya untuk mendorong Kemitraan Baru Strategis Asia Afrika (NAASP) dan menuntaskan hutang sejarah KAA untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina harus dibuktikan segera pasca-peringatan KAA dan WEF di Jakarta dan Bandung tahun ini.

Pendahuluan

Indonesia telah menggelar dua perhelatan berskala dunia, dengan menjadi tuan rumah peringatan KAA ke-60 tahun yang berlangsung di Jakarta dan Bandung dari 18-24 April 2015, dan pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur ke-24, yang diadakan di Jakarta pada 19-21 April 2015. Asia Afrika merepresentasikan dua kawasan yang luas dengan penduduknya mencakup tiga perempat penduduk dunia. Di kawasan ini terdapat 5 negara dengan populasi penduduk terbesardi dunia, yaitu di Tiongkok (1,4 milyar), India (1,3 milyar), Indonesia (251,5 juta), Pakistan (194 juta), Nigeria (177,5 juta), dan Bangladesh (158,5 juta). Peringatan KAA diikuti 22 kepala negara

dan 95 wakil presiden atau menteri, mewakili 86 dari 109 negara yang diundang, termasuk perwakilan negara peninjau dan organisasi internasional. Peringatan KAA diarahkan pada 3 tujuan kerjasama, yakni penguatan solidaritas politik dan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Di pilar politik, membahas isu toleransi, perdamaian dan solidaritas, dan upaya memerangi kejahatan transnasional. Di pilar ekonomi dan pembangunan dibahas peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi, infrastruktur, energi, dan maritim. Sementara, dalam pilar sosial-budaya dibahas masalah demokrasi, pemberdayaan perempuan, dan pengurangan resiko akibat bencana alam. Semuanya diarahkan untuk

*) Profesor Riset Masalah-masalah Politik, Keamanan, Dekomokrasi, dan *non-traditional security threats* pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: pptogin@yahoo.com.

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

mengurangi kesenjangan dalam berbagai hal, yang dihadapi negara dan rakyat di kedua benua tersebut. Output KAA adalah ekspresi pernyataan bersama (deklarasi) yang tertuang dalam Semangat atau Pesan Bandung, yang bersifat multilateral.

Sedangkan WEF diikuti para pengambil keputusan di tingkat pemerintahan dan kalangan swasta, terutama perusahaan besar, dari berbagai negara, terutama negara-negara maju, dengan 600 lebih peserta dari 1000 undangan dari 40 negara, 40 menteri, dan 180 eksekutif bisnis (CEO), serta perwakilan organisasi internasional. Jika dalam KAA, target Indonesia mencakup politik dan ekonomi, dalam WEF fokus pada ekonomi, sebagai ajang promosi Indonesia untuk investasi asing. WEF menjadi ajang jualan infrastruktur atau promosi investasi, dengan memiliki output berupa komitmen kerjasama dan investasi yang dituangkan dalam MOU yang bersifat bilateral. Media Eropa memberi perhatian pada WEF di Jakarta karena minat Eropa untuk memantau dinamika ekonomi di Asia Pasifik masih ada. Hal ini wajar, sebab pertumbuhan ekonomi Eropa masih stagnan. Sementara, peserta yang hadir dalam WEF adalah dari negara-negara yang dalam beberapa dasawarsa belakangan adalah penggerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan, atau menjadi pemain dan penentu baru di tingkat global.

Kepemimpinan Indonesia

Indonesia memiliki kepentingan yang sama, dalam kedua perhelatan internasional tersebut, yaitu menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia yang multipolar saat ini. Indonesia juga berupaya meraih manfaat untuk kepentingan nasional, seperti mengatasi defisit perdagangan dan kelangkaan pembiayaan pembangunan, dengan mendorong kerjasama antar-negara dan lintas-kawasan.

Sebagai bagian dari upaya mendukung atau memperkuat kinerja pemerintah, parlemen (DPR) telah menggelar *side event*, berupa Konferensi Parlemen Asia Afrika di gedung DPR pada 23 April 2015. KPAA menghasilkan sebuah deklarasi yang menunjukkan komitmen negara-negara yang hadir untuk meindaklanjutinya, terutama terhadap langkah mewujudkan kemerdekaan Palestina dan kemitraan dalam kerangka NAASP. KPAA juga bertekad mendorong kerjasama Selatan-Selatan dan menjadikan parlemen sebagai penggerak dan pemelihara demokrasi. Sebagai konsekuensinya, sebuah kantor sekretariat

tetap dan pembiayaan rutin dari APBN harus ada untuk menindaklanjuti pertemuan yang akan dilakukan secara reguler dalam kerangka mendukung kegiatan parlemen Asia Afrika secara lebih terorganisasi.

Hal yang menggembirakan buat pencapaian kepentingan nasional dari peringatan KAA berbiaya Rp200 milyar ini adalah meningkatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara kecil di Pasifik Selatan, yang selama ini cenderung memusuhi Indonesia dalam menyikapi masalah Papua. Respons Fiji, Solomon, dan Vanuatu untuk membuka Kedubes di Jakarta sangat baik, terkait dengan upaya Indonesia untuk bisa meningkatkan perannya di Pasifik Selatan.

Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia sampai tahun 2014 masih memperlihatkan defisit perdagangan yang terus meningkat dengan beberapa negara anggota KAA, di antaranya dengan Bahrain dan Kazakhstan di Asia, serta Nigeria dan Zimbabwe di Afrika. Kemajuan ekonomi Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Tiongkok dan India, dua negara Asia pendukung utama KAA tahun 1955 tersebut telah bangkit menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Saat ini nilai perdagangan Indonesia-Afrika baru mencapai 10,7 miliar dolar AS. Sementara, India-Afrika mencapai 70 miliar dolar AS, sedangkan Tiongkok-Afrika bahkan telah mencapai 200 miliar dolar AS. India dan Tiongkok, terutama, terus tumbuh dengan ekonomi mereka yang dinamis dan menjadi mitra baru yang diperhitungkan dan sekaligus dicari banyak negara, khususnya negara maju yang pertumbuhan ekonomi mereka mengalami kemandekan akibat krisis di kawasan dan dalam negeri mereka yang belum dapat diatasi.

Dari sisi politik, India dan Tiongkok telah diakui kehadirannya sebagai kekuatan baru dunia, dengan kehadiran teknologi dan angkatan perangnya, minimal di kawasan, yang intensif, dengan kapasitas dan kapabilitasnya yang terus meningkat. Penting diperhatikan, situasi dunia ketika KAA 1955 diadakan dengan peringatannya sekarang ini, berbeda. Konteks Perang Dingin dan kondisi bipolarismenya, dengan hadirnya rivalitas Soviet dan AS, telah digantikan secara berangsur oleh unipolarisme di bawah kedigdayaan AS menuju multipolarisme, dengan kehadiran Tiongkok dan India dari Asia, dan beberapa negara lainnya di luar benua itu. Indonesia sendiri, sekalipun telah ditempatkan Presiden Jokowi dalam barisan baru negara besar, masih digugat, posisi, kinerja, dan kepentingannya untuk dijadikan mitra kerjasama yang dapat

diandalkan dalam jangka panjang. Penilaian ini dapat dilihat di kalangan analis dan pihak swasta pada umumnya.

Pentingnya Konsistensi

Secara khusus peringatan KAA menggelorakan kembali Semangat Bandung sebagaimana tertuang dalam Dasasila Bandung, yang intinya membebaskan dunia dari berbagai bentuk penjajahan dan mewujudkan dunia baru dari berbagai konflik akibat ketidakadilan. Karenanya, kelanjutan perjuangan kemerdekaan Palestina, sejak dini menjadi sorotan dan sekaligus agenda hutang yang harus segera diselesaikan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kepemimpinan Indonesia dalam mengelola kedua even internasional itu untuk mencapai tujuannya?

Kiranya menjadi hal yang logis jika kemudian muncul tagihan lebih lanjut terhadap kemampuan Indonesia untuk bisa menuntaskan hutang sejarah KAA 1955 membebaskan Palestina dari pendudukan Israel, dengan segala konsekuensinya. Tidak heran, PM Palestina yang hadir dalam peringatan KAA ke-60 tahun mengingatkan Indonesia untuk segera membuka kantor konsulat di Palestina sebagai bukti atas dukungannya yang kuat dan pengakuannya terhadap telah hadirnya sebuah negara Palestina merdeka. Kapabilitas kepemimpinan Indonesia di bawah presiden barunya tersebut terus diuji dengan pertanyaan tentang kemampuan Indonesia untuk membantu menyelesaikan transisi demokratis yang gagal di Arab dan Afrika, dan memadamkan konflik-konflik sektarian yang bermunculan pasca kegagalan itu. Sebab, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan yang sama, yang juga sulit diatasi.

Indonesia berupaya memimpin penyebaran pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global. Indonesia juga berupaya turut serta merespons dan mereduksi dampak ketidakadilan global yang bermunculan dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional. Namun, di dalam negeri sendiri pemerintah Indonesia masih kesulitan dalam mengatasi *illegal fishing* dan berbagai bentuk penyelundupan, terutama narkoba dan pekerja migran, dan ancaman terorisme akibat melebarnya kesenjangan domestik.

Kiranya menjadi hal yang pantas jika publik berharap lebih dari sekedar peringatan KAA dan WEF di Jakarta dan Bandung, dengan produk lebih dari sekedar deklarasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan global, agar keduanya tidak bernilai seremonial

saja. Konsekuensinya, agenda NAASP sudah harus dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk agenda aksi nyata atau berbagai program, walaupun tidak lepas dari kritik tidak mudah diwujudkan mengingat begitu banyaknya negara Asia Afrika yang terlibat. Kehadiran rejim di Asia Afrika yang tidak/belum demokratis dan terkena tuduhan pelanggaran HAM juga merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan untuk direspons, jika tujuan peringatan KAA selanjutnya adalah ingin menyebarkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta mereduksi ketidakadilan global. Sebagai konsekuensinya, menyelesaikan masalah di dalam negeri menjadi beban tersendiri sebelum negara-negara Asia Afrika di bawah kepemimpinan Indonesia dapat berperan keluar secara optimal untuk bersinergi membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina secepatnya.

Demikian pula, perjuangan negara dan rakyat di Asia Afrika semakin berat untuk pencapaian target reformasi PBB. Dalam perumusan *roadmap* sulit mencapai kata sepakat, karena pemimpin Asia Afrika yang hadir dalam peringatan KAA belum dapat memetakan kepentingan bersama. Banyak negara lebih tergoda mengedepankan kepentingan dan posisinya masing-masing daripada mendefinisikan kepentingan bersama dalam meluncurkan reformasi PBB. Padahal, di luar arena, Asia Afrika masih harus berhadapan dengan negara-negara besar pemegang hak veto dan penentu masa depan PBB, bersama negara lain yang sangat berpengaruh dengan kapasitas lobi-lobi internasional mereka. Sehingga, perjuangan menambah kursi keanggotaan tetap pemegang hak veto di DK PBB lebih muncul sebagai agenda perjuangan masing-masing negara Asia Afrika yang menginginkannya ketimbang kepentingan dunia.

WEF pun masih terbatas hasilnya pada pengembangan wacana kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, untuk negara Asia Afrika yang sangat berkepentingan, seperti Indonesia. Belajar dari *roadshow* Presiden Jokowi ke Jepang dan Tiongkok beberapa waktu sebelumnya, walaupun muncul komitmen tertentu, tetap saja realisasinya di lapangan masih harus dibuktikan atau ditunggu. Peluncuran Grow Asia, sebuah kemitraan yang melibatkan pemerintah, LSM, swasta, dan kelompok tani, bernilai konstruktif, yang diinisiasi Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina, namun masih harus ditunggu hasilnya. Begitu pula kesadaran untuk memerangi bersama secara lebih baik kejahatan transnasional, seperti terorisme, dan

juga pandemik, seperti Ebola, masih harus dibuktikan.

Kehadiran tata ekonomi dunia baru semakin dirasakan kebutuhannya. Namun, upaya untuk mereformasi agenda global, seperti di WEF dan reformasi PBB, yang melibatkan negara maju, tidak hanya Asia Afrika, tampaknya masih tersendat. Sedangkan institusi-institusi pendanaan pembangunan internasional, seperti IMF, World Bank, dan Asian Development Bank semakin diakui gagal menyelesaikan krisis ekonomi global dan kemiskinan di Asia Afrika. Seperti di KAA, dalam WEF, kesamaan lainnya adalah, komitmen kerjasama ekonomi bilateral ataupun multilateral juga masih ditunggu.

Penutup

Para pemimpin dan rakyat Asia Afrika, seperti halnya pengamat internasional, melihat kini waktunya bagi negara-negara Asia Afrika untuk melakukan aksi melalui kerjasama konkret. Berdiskusi di forum konperensi internasional dan media massa tanpa realisasi dalam kerangka aksi selain membutuhkan biaya tinggi, juga akan menjadi sia-sia. Sementara itu, masih banyak rakyat di kedua benua yang hidup di bawah sejahtera, tanpa rasa aman akibat konflik sosial yang belum teratasi. Berbagai inisiatif dan kerangka aksi melalui kerjasama konkret telah ditunggu, tidak cukup hanya dalam bentuk seruan, janji, dan komitmen yang tertuang dalam deklarasi akhir, yang telah dihasilkan konperensi dan forum internasional yang telah dijalankan.

Setelah 10 tahun sejak diluncurkan tahun 2005 dalam peringatan KAA ke-50 tahun, NAASP kini ditunggu implementasinya. Lambatnya aksi atau absennya segera aksi di lapangan, hanya akan memperkuat kritik media dan kepesimisan publik yang sudah muncul bersamaan dengan pelaksanaan KAA dan WEF. Padahal, seharusnya tidaklah demikian. Keduanya harus dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia, tidak hanya menghasilkan *endorsement* (dukungan) berulang bagi Indonesia secara politik dan ekonomi di fora internasional, dalam bentuk kerjasama konkret. Langkah baru yang maju untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, dan yang terlebih adalah hadirnya sebuah Palestina yang merdeka, jauh lebih berharga dan memberi nilai tambah dibandingkan dengan realisasi kerjasama ekonomi dalam bentuk peningkatan perdagangan dan investasi bilateral dan multilateral yang dapat diraih Indonesia sebagai tuan rumah kedua kegiatan internasional yang bernilai strategis tersebut.

Referensi

- Andhika, Donny AM. “”Dengarkan Suara Asia Afrika, *Media Indonesia*, 24 April 2015: 1.
- _____. “Presiden Xi Jinping Siap Hadir,” *Media Indonesia*, 18 April 2015: 8.
- _____. “RI Diharap Tingkatkan Peran di Pasifik,” *Media Indonesia*, 20 April 2015:8.
- “Asia-Afrika Butuh Kerjasama Konkret,” *Koran Tempo*, 21 April 2015: 34.
- “Gelar World Economic Forum Asia Timur: Jualan Infrastruktur, BKPM Ngarep Investasi Melonjak,” *Rakyat Merdeka*, 21 April 2105: 14.
- “Hasil Konperensi Asia Afrika (KAA) ke-60: Minim Realisasi Komitmen Konkret,” *Neraca*, 27 April 2015: 1.
- “KPAA Sepakati Bentuk Sekretariat di Indonesia,” *Suara Pembaruan*, 24 April 2015: A9.
- “Peringatan 60 tahun Konperensi Asia Afrika,” *Kompas*, 19 April 2015: 8-9.
- Sa’diyah, Alimatus. “Buang IMF dan Bank Dunia.” *Republika*, 23 April 2015: 1.
- Sa’diyah, Alimatus dan Melisa Riska Putri. “Dunia Harus Dengarkan KAA,” *Republika*, 24 April 2015: 1.
- “Simbol Kebangkitan Asia Afrika: Seruan Reformasi PBB Tak Mudah Diwujudkan,” *Kompas*, 24 April 2015: 1.-15.